

## **KEGIATAN Advokasi KASUS TSS 1999-2003<sup>1</sup>**

### **10-FEBRUARI-1999**

Audiensi ke Puspom TNI- Danpuspom tidak bisa menerima, dengan alasan sedang tidak ada ditempat.

### **15-FEBRUARI-1999**

Puspom TNI mengeluarkan keterangan pers, bahwa: (1) Mahasiswa tidak bersedia memberikan kesaksian. Peluru yang sudah diuji balistik belum ada yang identik dengan senjata aparat jenis SS-1 dan M-16. Belum diketahui siapa pelaku penembakan baik dari ciri-ciri maupun tanda-tandanya. PANGLIMA menyatakan bahwa ada peluru yang bukan standar ABRI.

### **4-MARET-1999**

Audiensi ke F-ABRI DPR RI diterima Mayjen TNI Siregar, laksad dalam sinuraya, Kol. Djawijaya (kowad). F-ABRI menyatakan desakan pengusutan kasus Semanggi akan disampaikan kepada pimpinan fraksi ABRI DPR RI

### **15-MARET-1999**

Audiensi Komnas HAM diterima oleh Asmara Nababan dan Soegiri. Komnas HAM menyatakan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengusut kasus semanggi.

### **29-MARET-1999**

Audiensi ke Pomdam Jaya, Danpomdam Jaya tidak bersedia menerima dengan alasan kontraS bukan lembaga pengacara. hanya diterima Kep.Bag. Penyidik Pomdam Jaya, Mayor CPM Ir. YW. Wempi Hapan, MSc, eng. yang menyampaikan bahwa kasus Semanggi belum bisa diungkap karena keterangan saksi baru dari pihak tentara, sedangkan keterangan dari pihak sipil belum memadai. Untuk itu keluarga korban diminta bersabar menunggu penjelasan panglima TNI

### **14-Mei-1999**

Aksi Long March ke Istana Merdeka                      Menuntut penuntasan kasus dan tanggungjawab Pemerintah

### **10-Juli-1999**

---

<sup>1</sup> Pendamping : TruK, Sanggar Ciliwung, Kontras, PBHI, Elsam, AKKRA, Famred, FAM Atma Jaya, KMSI, FPPI, ISAI, KOMPAK, POSKO TEKNIK UI, KBU, FAM UI, KAMPUS UNGU, KOMPERAK

Audiensi ke Dephankam, Delegasi hanya diterima oleh Kasubag Audio Visual Humas, letkol Oma Rubama. Delegasi memilih untuk tidak mengadakan dialog karena Menhankam tidak mau menerima secara langsung.

**22-Juli-1999**

Aksi ke Puspom TNI Menuntut Kapuspom melakukan penyelidikan kasus TSS

**16-Juli-1999**

Audiensi ke F-PPP DPR-Riditerima oleh pimpinan fraksi PPP, Zarkasih Nur. PPP menyatakan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengusut kasus TSS.

**29-Juli-1999**

Audiensi ke Pomdam Jaya. Danpomdam tidak bisa menerima dengan alasan mengikuti rapat di Polda, untuk mempersiapkan acara peringatan 17 Agustus. Kep. Bag. Penyidik Pomdam Jaya, Mayor (CPM) Ir. YW. Wenpi Hapan, Msc, menyatakan kasus Semanggi belum bisa disidangkan karena alat bukti belum cukup. Selanjutnya keluarga korban diusir keluar gedung/balai pertemuan.

**4-Agustus-1999**

Audiensi Ke DPP-PKB diterima ketua umum DPP-PKB, Matori Abd Jalil. PKB menyatakan akan memperjuangkan pengusutan kasus Semanggi.

**5-Agustus-1999**

Audiensi ke Pomdam Jaya diterima Danpomdam Jaya, Kol (CPM) Mungkono. Danpomdam Jaya menyatakan peluru yang mengenai para korban sudah dilakukan uji balistik, tetapi tidak bisa lagi diidentifikasi karena mantel-peluru tersebut sudah rusak

**6-Agustus-1999**

Audiensi ke DPP PAN diterima Sekjen DPP PAN, Faisal Basri. PAN berjanji akan memperjuangkan pengusutan kasus Semanggi.

**16-Agustus-1999**

Audiensi ke DPP PDI Perjuangan diterima Dimiyati Hartono. PDIP menjanjikan akan memperjuangkan pengusutan kasus semanggi.

**19-Agustus-1999**

Audiensi ke Kantor perwakilan PBB untuk HAM (UNHCR) di Jakarta, diterima kepala kantor UNHCR Sam S. Souryal. UNHCR berjanji akan mengirim rekomendasi penuntasan kasus Semanggi ke instansi terkait, dan mendesak pemerintah RI untuk mengusut kasus Semanggi.

**15-SEPTEMBER-1999**

Aksi Damai ke Dephankam, dihambat oleh aparat di Jl Thamrin, dekat Mc. Donald-pasar Sarinah. Aparat merepresi massa aksi, dengan penganiayaan dan penembakan dengan peluru karet.

**13-Oktober-1999**

Audiensi ke fraksi Utusan Golongan MPR RI diterima ketua fraksi utusan golongan MPR RI Marzuki Usman, Ny, Sedong Oka, Djoko Wijono. Mereka berjanji akan berusaha mengangkat kasus Semanggi dalam Sidang Umum MPR Oktober 1999.

**22-Februari-2000**

Audiensi ke Komnas HAM diterima oleh Asmara Nababan, BN Marbun. Keduanya menyatakan usulan pembentukan KPP HAM kasus semanggi akan dibicarakan pada rapat pleno komnas HAM (29/2)

**7-Maret-2000**

Aksi damai ke Istana Merdeka, untuk menjumpai presiden, tetapi tidak berhasil.

**14-Maret-2000**

Aksi damai ke Istana Merdeka untuk menjumpai presiden, namun pihak istana tidak bersedia menerima.

**4-Mei-2000**

Audiensi ke fraksi PDI-P diterima Paulus Widiyanto, Panda Nababan, Firman Jaya Deli. F-PDI-P berjanji akan meminta Danpuspom TNI datang ke DPR untuk menjelaskan perkembangan kasus Semanggi. Jika TNI tidak memenuhi undangan, fraksi PDI-P akan menandatangani Puspom TNI. akan memfasilitasi pertemuan antara panglima TNI dan Danpuspom TNI dengan keluarga korban (Trisakti dan Semanggi). Dan PDI-P akan berupaya kasus semanggi diangkat dalam rapat-rapat di DPR.

**13-Juni-2000**

Monitoring rapat kerja komisi I dan II DPR RI dengan Kapolri dan Panglima TNI DPR RI. Panda nababan, Teras Narang, dan Firman jaya daeli Fraksi PDI-P mengangkat kasus Semanggi. Dan Polri menyatakan sudah menyelesaikan tugasnya dalam memberikan bantuan teknis penyidikan kepada Pomdam Jaya, sehingga penanganan kasus semanggi I dan II kini menjadi tanggung jawab Puspom/Pomdam Jaya

**16-Juni-2000**

Audiensi ke Polda Metro Jaya diterima Kaditserse Polda Metro Jaya, Kol. Pol. Alex Bambang Riatmojo. Disampaikan bahwa: 1. laporan hasil penyidikan kasus semanggi II sudah dilaporkan Polri ke Pomdam Jaya, dan siapa nama penembaknya sudah dapat

diketahui dari hasil penyidikan tersebut. Sedangkan perkembangan kasus Semanggi I tidak banyak diketahui karena ditangani Kaditserse yang terdahulu.

#### **6-Juli-2000**

Audiensi keFraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI diterima Drs. Ali Masykur Musa, (Wakil ketua fraksi PKB), dan Drs Susono Yusuf (Wakil sekretaris). F PKB menyatakan akan segera menulis surat kepada Panglima TNI, dan Puspom TNI serta Kapolri untuk menanyakan perkembangan pengusutan kasus semanggi I dan II.

#### **13-Juli-2000**

Audiensi Ketua MPR RI diterima Dr Amin Rais. Ketua MPR berjanji akan bersama-sama dengan keluarga korban peristiwa semanggi I dan II, dan peristiwa Mei 98, akan mendatangi pihak-pihak yang terkait ; Presiden, Menhankam, dan Panglima TNI.

#### **6-FEBRUARI 2001**

Dalam RDPU DPR RI, Pansus mengundang korban Trisakti, Semanggi I untuk memberikan masukan yang akan dipakai untuk materi pembahasan TSS di Pansus.

#### **9-Juli-2001**

Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus TSS, disampaikan Sutardjo Surjoguritno. Isi laporan : 1. F-PDI P, F PDKB, F PKB (3 fraksi ) menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat. Sedangkan F-Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7 fraksi) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

#### **13-Juli-2001**

Audiensi danaks i ke Komnas HAM di terima Mohammad Salim dan Soegiri. Menuntut kesungguhan Komnas HAM dalam melakukan penuntasan kasus TSS.

#### **18-Juli-2001**

Audiensi ke Istana Presiden, diterima Presiden Abdul Rahman Wahid. Presiden menyatakan Pernyataan: 1.Status pengadilan tragedi Trisakti, Semanggi I dan II seharusnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung, sehingga penuntasan kasus TSS bisa diteruskan sampai ke proses banding di pengadilan tinggi, dan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. 2.harus dipisahkan antara TNI/Polri sebagai institusi dengan dan pribadi-pribadi yang bersalah. 3. Presiden berjanji akan mempelajari kasus Trisakti, semanggi I dan II bersama anggota kabinet dan Jaksa Agung. 4. keluarga korban diharapkan untuk tidak berhenti memperjuangkan keadilan.

#### **4-SEPTEMBER 2001**

Audiensi ke Mahkamah Agung diterima M Taufiq (Wakil Ket MA), Laica Marzuki (Hakim Agung), Said Harahap, Abdul Rahman Saleh, Mugihardjo (Direktur Pidana), Sirman Hudiarjo (ket Muda Urusan Militer. Dinyatakan bahwa rekomendasi Pansus Trisakti, Semanggi I dan II DPR RI tidak berketentuan hukum. Karena Rekomendasi bukan bentuk peraturan perundang-undangan yang bisa di uji oleh MA.

**7-SEPTEMBER-2001**

Audiensi ke Komnas HAM, meminta Komnas HAM Merespon rekomendasi pansus Trisakti, semanggi I dan II DPR RI yang menyatakan tidak ada pelanggaran M berat pada kasus TSS.

**13-NOVEMBER-2001**

Audiensin ke Komnas HAM diterima pimpinan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II: Dr Albert Hasibuan dan Usman Hamid, menanyakan perkembangan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

**23-JANUAR-2002**

Audiensi ke Kantor Perwakilan PBB meminta dorongan penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I dan II dengan mensosialisasikan kasus T di tingkat Internasional. Perwakilan PBB di Jakarta menyatakan bahwa pernyataan sikap AKKRA (aliansi korban kekerasan Negara) akan dikirim ke PBB.

**20-FEBRUARI-2002**

Audiensi ke Komnas HAM diterima Djoko Sugianto (ketua Komnas HAM). Joko menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan tindakakan proses hukum dengan meminta bantuan ke kejaung untuk mendapatkan dokumen dari TNI/Polri dan pengadilan negeri jakarta pusat untuk memanggil paksa para jendral TNI/Polri

-----  
Audiensi ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat, diterima Rudy As'ad (Wakil Ketua) dan Andi Samsam Nganro (Humas), meminta ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil keputusan sesuai hukum dan rasa keadilan, serta tidak mudah patah ditengah jalan karena tekanan TNI/ Polri, terkait tindakan Mabes TNI/Polri telah mengajukan surat keberatan atas permohonan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II untuk melakukan upaya pemanggilan paksa para jendral. Dan pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menghadapi kesulitan dalam memutuskan permintaan bantuan KPP HAM Trisakti, semanggi I dan II, karena ketua pengadilan sedang melakukan ibadah Haji.

**21-FEBRUARI-2002**

Mengajukan somasi kepada presiden, karena presiden tidak mendukung pengusutan dan penyelesaian kasus Trisakti, semanggi I dan II.

Aktivis mahasiswa 98 mengadakan konfrensi pers didepan keluarga korban untuk klarifikasi adanya oknum-oknum mahasiswa yang mencatut nama dan memalsukan

tanda tangan beberapa mahasiswa dengan mengatasnamakan gerakan eksponen 98 yang menentang dibentuknya KPP HAM Trisakti, semanggi I dan II.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui keabsahan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II yang selama ini menjadi pro kontra.

#### **11-MARET-2002**

Audiensi ke Ke Komnas HAM diterima pimpinan KPP HAM TSS Dr Albert Hasibuan dan Usman Hamid, disampaikan bahw pemanggilan terhdap Jendral Purn Wiranto untuk memberikan keterangan kepada KPP, jam 10.00, tetapi s.d. jam 11.30 Wiranto belum juga memenuhi undangan.

Keluarga korban bersilaturahmi ke rumah jend. Wiranto sesuai alamat surat pemanggilan KPP HAM untuk mengingatkan bahwa Wiranto ditunggu kedatangannya di komnas HAM. Surat dan setangkai bunga untuk Wiranto disampaikan melalui Suharlan (ajudan)

#### **12-SEPTEMBER-2002**

Audiensi ke Komnas HAM diterima Saruda Nusantara, Djuwaldi dan Hasto Atmojo. Komnas menyatakan bahwa posisi Komnas berhadapan dengan DPR dan kejaksan Agung yang tidak mendukung hasil penyelidikan kasus trisakti, semanggi I dan II.

#### **20-DESEMBER-2002**

Orasi di Tugu Proklamasi, dan testimoni penembakan Irmawan (wawan) dalam kegiatan peringatan hari HAM.